

**LAPORAN
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS**



JUDUL PENELITIAN

**POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM
MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Oleh:

Dr. HAILUDDIN, MP. (Ketua)

Drs. Akung Daeng, M.Si. (Anggota)

Drs. Mahyuddin Nasir, M.Si.(Anggota)

Drs. Alamsyah AB, MP. (Anggota)

Irwan Suriadi, SE., M.Si. (Anggota)

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

ILMU EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MATARAM

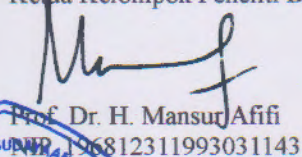
Tahun 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS**

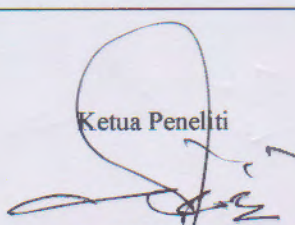
| | | | |
|----|---|---|---|
| 1 | Judul Penelitian | : | Potensi Sektor Unggulan Dan Kontribusinya Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Lombok Barat |
| 2 | Topik Unggulan | : | Pengembangan Materi Ekonomi Regional |
| 3 | Kelompok Peneliti Bidang Ilmu | : | Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan |
| 4 | Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP/NIDN c. Jabatan fungsional d. Fakultas e. Alamat Institusi f. Telepon/Faks/e-mail | : | Dr. HAILUDDIN, MP. 196012311988031004/0031126031 Lektor Kepala Ekonomi Pembangunan / Fakultas Ekonomi Jl.Majapahit No 62 Mataram |
| 5 | Anggota Peneliti | : | 1. Drs. Akung Daeng, M.Si. 2. Drs. H. Mahyuddin Nasir, M. Si. 3. Drs. Alamsyah AB, MP. 4. Irwan Suriadi, SE., M.Si. |
| 6 | Mahasiswa yang terlibat | : | 1 Orang |
| 7 | Waktu Penelitian | : | 6 Bulan |
| 8 | Luaran Wajib | : | • Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional) |
| 9 | Luaran Tambahan | : | • Rekomendasi Kebijakan |
| 10 | Pembiayaan a. PNBPN UNRAM b. Biaya dari Instansi lain c. Biaya dari peneliti sendiri | : | Rp 15,000,000 Rp 0 Rp 0 |

Mataram,20-10-2022

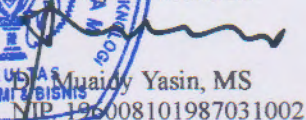
Mengetahui
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu


Prof. Dr. H. Mansur Afifi
NIP. 196812311993031143

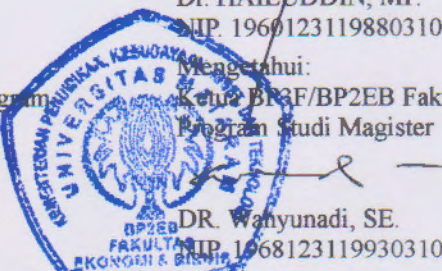
Ketua Peneliti


Dr. HAILUDDIN, MP.
NIP. 196012311988031004


Mengetahui
Rektor Fakultas Ekonomi / Direktur Program
Pascasarjana UNRAM


DR. Wanyunadi, SE.
NIP. 196812311993031009

Mengetahui:
Ketua BPPF/BP2EB Fakultas Ekonomi / Prodi/
Program Studi Magister


DR. Wanyunadi, SE.
NIP. 196812311993031009

Mengetahui
Ketua LPPM UNRAM


Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D.
NIP. 197207271999031002

ABSTRAK

Penelitian dengan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai potensi ekonomi yang menjadi dominasi serta memiliki keunggulan terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder *time series*. Selanjutnya data dianalisis dengan memakai Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ); Model Rasio Pertumbuhan (MRP); dan analisis kesempatan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat selama periode 2017–2021, dengan analisis Location Quotient (LQ), memiliki 12 sektor yang masuk katagori sektor basis (unggulan), yaitu sektor penyediaan akomodasi makan minum, Industri Pengolahan, Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Pendidikan dll. Selanjutnya dari Rasio Pertumbuhan (MRP), Lombok Barat memiliki 6 sektor ekonomi yang menonjol dengan ratio pertumbuhan (RPs) yang positif dan lebih besar dari 1. Sektor-sektor tersebut antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan lainnya. Untuk itu dari kajian tipologi Klassen Lombok Barat termasuk dalam klasifikasi Tipe II yaitu '*daerah tertinggal dan dalam proses membangun*'. Ini terjadi karena sektor-sektor pendukung pertumbuhannya masih didominasi oleh sektor sekunder yang mulai mengarah ke sektor tersier.

Dengan kondisi di atas peluang kesempatan kerja didominasi oleh 5 sektor ekonomi utama yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Keuangan dan Asuransi, Perusahaan, dan sosial. Sedangkan sektor lain relative masih kecil kontribusinya dalam penciptaan kesempatan kerja. Karenanya eksistensi sektor-sektor potensial yang ada harus tetap dijaga, dengan melakukan pemetaan potensi yang dimiliki dan diekspos secara luas. Promosi dan inovasi periodik terhadap hasil produksi/industri dan jasa di tingkat lokal/nasional maupun internasional, mesti terus digalakkan dan dikembangkan.

Kata kunci: *Sektor unggulan/basis, Tipologi Klassen, Location Quotient, Rasio Pertumbuhan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian ini dapat dilakukan dengan baik. Judul yang diangkat adalah Potensi Sektor Unggulan Dan Kontribusinya Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Lombok Barat.

Proses penelitian, sejak perencanaan sampai penulisan laporan akhir dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Hal ini disebabkan karena persiapan yang dilakukan sudah cukup baik disamping adanya hubungan personal antar tim yang cukup solid pula. Meski demikian jika sekiranya ada hal-hal yang masih dianggap kurang dalam pembahasannya, maka tim peneliti masih terbuka untuk mendiskusikannya.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami dari tim peneliti tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya, baik secara kelembagaan maupun personal, terutama kepada Rektor Universitas Mataram, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, ketua LPPM serta pihak-pihak terkait lain yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini.

Semoga apa yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut akan memberikan manfaat yang berarti terhadap kegiatan penelitian ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Mataram, Nopember 2022.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| | |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Pertumbuhan Ekonomi..... | 6 |
| 2.2 Pola Pertumbuhan..... | 9 |
| 2.3 Basis Ekonomi | 11 |
| 2.4 Sektor Unggulan..... | 12 |
| 2.5 Produk Domestik Regional Bruto..... | 14 |
| 2.6 Road Map Penelitian..... | 15 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 16 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 16 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 16 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data Serta Teknik Pengumpulan..... | 16 |
| 3.4 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional..... | 17 |
| 3.5 Analisis Data..... | 18 |
| | |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN | 22 |
| 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian | 22 |
| 4.2 Sektor Unggulan dan Penciptaan Kesempatan Kerja..... | 23 |
| A. Analisis Tipology Klassen..... | 24 |
| B. Analisis Location Quotient (LQ)..... | 27 |

| | |
|--|----|
| C. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)..... | 29 |
| D. Analisis Peluang/Kesempatan Kerja..... | 32 |
| | |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 34 |
| 5.1 Kesimpulan | 34 |
| 5.2 Saran..... | 35 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 37 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan pendapatan perkapita dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk serta memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karenanya pembangunan ekonomi juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. Semua hal tersebut tentu akan dapat berjalan, apabila sumber daya (alam dan manusia), tingkat teknologi, keadaan pasar dalam perekonomian serta sifat dari output itu sendiri dapat dialokasikan dengan optimal.

Untuk memenuhi harapan tersebut berbagai upaya dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, antaranya dengan perbaikan aspek kelembagaan, perubahan struktur ekonomi, paket kebijakan dan dukungan permodalannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Semua itu dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada.

Selaras dengan hal tersebut, pembangunan daerah juga tentu penekanannya pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi masyarakatnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu daerah antara lain ketersediaan modal yang cukup sehingga kegiatan pembangunan akan dapat berjalan dengan lancar, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa terjadi. Modal tersebut akan lebih bermakna jika diinvestasikan pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan dan memiliki daya dorong bagi sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan lebih cepat.

Tolok ukur perkembangan ekonomi suatu daerah, salah satunya dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan memperhitungkan peranan dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, maka secara spasial dapat diketahui sektor dan potensi-potensi dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur yang diikuti oleh perubahan laju pertumbuhan ekonomi persektor, tentu akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Selain itu perubahan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor juga akan berdampak pada perubahan struktur perekonomian daerah tersebut.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan potensi dan kekhasan daerah akan berdampak pada pembangunan daerah, terutama pada daerah yang sedang berkembang. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya dengan tepat sasaran akan menjadi daya dorong dalam mendukung perkembangan suatu daerah. Hasil dari kegiatan tersebut tentu akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dengan terbukanya lapangan kerja baru tentu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran dan perputaran roda perekonomian akan menjadi lebih baik, karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya mampu menciptakan permintaan atas barang-barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hal ini berarti mencerminkan perekonomian masyarakat sudah makin membaik pula.

Hal lain yang cukup mendorong perkembangan ekonomi daerah adalah adanya otonomi daerah. Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah banyak berpengaruh terhadap kelembagaan yang ada baik yang sudah lama terbentuk maupun yang baru, baik terhadap jumlah maupun nama dari lembaga tersebut. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan utama dari adanya perubahan dan pemekaran, disamping alasan-alasan lain seperti pemerataan pembangunan, peningkatan aksesibilitas, dan kemudahan operasional pembangunan (Anonim, 2020).

Pemberlakuan otonomi sangat dimungkinkan akan meningkatkan investasi karena adanya pengurusan perijinan yang lebih mudah. Bila sebelumnya ijin PMA harus ditandatangani Presiden, dengan otonomi cukup dilakukan Bupati/Walikota. Mekanisme perijinan yang demikian memberikan peluang bagi investor mempercepat realisasi investasinya, meminimalkan pengeluaran yang tidak terarah dan meminimalkan terjadinya konflik dengan lingkungan daerah tujuan. Konflik tersebut relatif dapat dihindarkan karena adanya peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu investor memilih tempat usaha dan mengembangkan aliansi strategisnya dengan faktor-faktor produksi di daerah. Bagi Pemda, mekanisme

tersebut akan memperkuat posisi tawar kabupaten/kota dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah setempat (Sudantoko, 2003).

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah otonom di Nusa Tenggara Barat, telah mengidentifikasi dan mampu menganalisis masalah dan potensi yang ada di daerah. Kebijakan ini dianggap tepat untuk menjadikan daerah semakin baik dari tahun ke tahun. Pembangunan yang dilakukan tentu dengan memperhatikan semua aspek yang ada, seperti letak geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sosial budaya masyarakatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemda akan lebih tepat sasaran. Hal positif lain dengan otonomi ini adalah daerah akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi unggulan kekhasan daerah, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah yang dapat memperluas lapangan kerja dan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan merujuk pada gambaran diatas, maka Pemda Lombok Barat perlu mengarahkan pembangunan pada semua sektor/subsektor, dengan penekanan pada sektor prioritas seperti agribisnis, kelautan/perikanan, pariwisata dan jasa-jasa. Pariwisata merupakan andalan karena potensinya yang cukup besar di daerah ini, baik wisata pantai/gili, pegunungan/lembah, alam/hutan serta wisata budayanya. Pengembangan agribisnis ditujukan untuk memanfaatkan peluang pasar yang potensial, antara lain jagung, tembakau, sayur/buah, perikanan dan peternakan. Demikian juga untuk sektor jasa yang akan sangat mendukung sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Semua itu muaranya tentu akan makin terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana gambaran latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sektor/subsektor ekonomi apakah yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Lombok Barat pada kurun waktu 2015–2020 dan prospek kedepan.
2. Seberapa besar kontribusi sektor unggulan tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja bagi perekonomian daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sektor/subsektor ekonomi yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Lombok Barat pada kurun waktu 2015–2020 dan prospek kedepan.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Sektor Unggulan dimaksud dalam menciptakan kesempatan kerja bagi perekonomian daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai informasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi untuk meningkatkan PDRB Lombok Barat.
2. Disamping itu bisa memberikan informasi kepada Pemda tentang sektor/subsektor ekonomi yang berkontribusi signifikan dalam menciptakan kesempatan kerja di Lombok Barat.

BAB II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Banyak teori yang menjelaskan dan menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi. Mazhab *Historians*, misalnya menggambarkan perkembangan ekonomi merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu, anggapan tentang adanya hukum alam di bidang ekonomi sulit diterima. Tokoh utama (Friedrich List) paham ini menyatakan bahwa sistem liberalisme yang *laissez-faire* tidak dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal (Arsyad, 2010). Dalam praktiknya, perkembangan ekonomi tergantung pada peran pemerintah, dunia bisnis dan lingkungan kebudayaan. Kasus di beberapa Negara, terdapat dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian nasionalnya yaitu sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian diperlukan sebagai pemasok bahan pangan bagi masyarakat, tetapi tidak bisa diandalkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga suatu negara tidak akan pernah mencapai kemajuan apabila negara tersebut hanya bertumpu pada kekuatan pertanian saja. Dan yang mampu membawa perekonomian pada tingkat yang lebih tinggi adalah sektor industri. Oleh karena itu, industrialisasi merupakan langkah awal untuk membawa perekonomian kearah yang lebih maju.

Disisi lain, Rostow mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi linier (*linear stages model*), dimana proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan ke dalam lima tahap, yaitu: masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk lepas landas (*the preconditions for take-off*), lepas landas (*the take-off*), menuju kekedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*) (Arsyad, 2010). Dasar yang digunakan Rostow dalam

membedakan tahap-tahap pembangunan ekonomi tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi, mengingat pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional, dimana pembangunan ekonomi bukan hanya bermakna perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara yang diindikasikan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peran sektor industri.

Selanjutnya tokoh klasik *Adam Smith* berpendapat bahwa pertambahan penduduk akan memperluas pasar, yang selanjutnya perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Sehingga menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpaduan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000). Lebih lanjut dikatakan bahwa sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Hal ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah.

Disisi lain Robert Malthus menitikberatkan perhatiannya pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan penduduk akan

meningkatkan kesejahteraan hanya apabila pertumbuhan tersebut akan meningkatkan “*effective demand*”. Peningkatan permintaan efektif tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan dapat dicapai dalam jangka pendek, asal dikombinasikan pada proporsi yang besar. Faktor-faktor yang menentukan pembangunan ekonomi adalah tergantung pada tenaga kerja, modal, dan organisasi (Suryana, 2000),

Sedangkan *Solow-Swan* (neoklasik), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi sangat dominan (Arsyad, 2010). Menurutnya, rasio *modal-output* dapat berubah-ubah, dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah *output* tertentu, dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika lebih banyak modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, dan sebaliknya. Fleksibilitas dalam suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu (Irawan, 2012).

Kajian dari aspek yang berbeda diungkapkan *Teori Pertumbuhan Endogen*. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu pengertian modal di sini bersifat lebih luas, bukan hanya sekedar modal fisik tetapi juga mencakup modal insani (Arsyad, 2010). Selanjutnya dijelaskan faktor utama penyebab terjadinya

perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar negara adalah karena adanya perbedaan mekanisme alih pengetahuan, kapasitas investasi modal fisik, modal insani, dan infrastruktur. Karenanya teori ini menggunakan asumsi *increasing returns to capital investment* pada fungsi produksi agregatnya.

Model ini menganggap ilmu pengetahuan sebagai salah satu bentuk modal, dan merupakan input terpenting dalam proses produksi. Hanya berkat ilmu pengetahuan orang dapat menciptakan metode baru dalam berproduksi sehingga diperoleh keuntungan-keuntungan ekonomis tertentu. Oleh karena itu, kurang realistis jika kita mengasumsikan ilmu pengetahuan memiliki muatan pengembalian yang semakin menurun. Demikian juga dijelaskan bahwa akumulasi modal tidak mengalami *diminishing returns*, namun justru akan mengalami *increasing returns* dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu teori pertumbuhan endogen mempunyai tiga elemen dasar yaitu:

- a. Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan.
- b. Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan.
- c. Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.

2.2 Pola Pertumbuhan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana digambarkan diatas, tentu hal tersebut tidak lepas dari pola perkembangan sektor yang mendukungnya.

Misalnya, beberapa pola pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum (Irawan, 2012).

- a. Perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Perdagangan memungkinkan adanya perluasan alternatif atau pilihan atas barang yang bisa dikonsumsi atau diproduksi oleh suatu Negara atau bangsa. Pencapaian skala ekonomi yang paling optimal dimungkinkan karena dengan adanya perdagangan perluasan pasar dapat dilaksanakan. Secara teknis perdagangan juga memungkinkan berkembangnya inovasi-inovasi teknologi baru, sehingga memperluas pilihan produksi dan konsumsi.
- b. Pola Ekspor. Pola pengembangan pasar dalam negeri digunakan oleh negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam, sedangkan negara-negara yang miskin akan sumberdaya alam menganut pola pengembangan pasar luar negeri. Kedua jenis pola ini bila sama-sama berhasil akan mampu menopang perkembangan produksi di dalam negeri yang selanjutnya berarti menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan nasional.
- c. Strategi pasar dalam negeri. Negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam memilih strategi ini. Strategi ini cukup mudah, karena bahan mentah banyak maka harga relatif murah dan hasil produksi juga menjadi murah harganya. Jika pasar dalam negeri sudah tidak mampu menampung hasil produksi, maka produk tersebut dicarikan pasar luar negeri.

Dalam teori perubahan strukturalis, perhatiannya terpusat pada mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari sesuatu yang berat ke pertanian tradisional (untuk mencukupi keperluan sendiri) kepada suatu perekonomian yang lebih modern

(lebih mengarah ke kota) dan lebih beraneka di bidang industri dan jasa. Karenanya analisis pola pembangunan akan memusatkan perhatiannya kepada proses yang mengubah secara bertahap struktur ekonomi, industri dan kelembagaan pada suatu perekonomian yang terbelakang, sehingga memungkinkan industri-industri baru menggantikan pertanian sebagai penggerak pembangunan.

Perubahan struktural ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk transformasi produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional dan sumberdaya serta perubahan faktor-faktor sosio-ekonomi seperti urbanisasi, pertumbuhan dan distribusi penduduk (Todaro, 2010). Kegiatan-kegiatan tersebut akan membentuk suatu pola pertumbuhan dimana dapat digolongkan dalam klasifikasi tertentu untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah.

2.3 Basis Ekonomi

Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja baru (Arsyad, 2010). Hal senada diungkapkan Glasson (2007), bahwa kegiatan basis merupakan kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Tarigan (2012) juga mengungkapkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari daerah sumber. Karena itu ekonomi basis didasarkan pada asumsi bahwa lokal ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor besar yaitu:

- a. Sektor basis (non-lokal sektor), yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri yang berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kekuatan memenuhi kebutuhan dalam daerah serta mampu mengekspor barang maupun jasa keluar daerah itu sendiri.
- b. Sektor non basis (lokal sektor), yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar dalam daerah tersebut.

Analisis basis dan non basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah atau lapangan kerja. Karena itu analisis menggunakan variabel lapangan kerja, pendapatan atau ukuran lain, tetapi yang umum di pakai adalah lapangan kerja atau pendapatan. Secara logika penggunaan variabel pendapatan lebih mengena kepada sasaran. Peningkatan pendapatan di sektor basis akan mendorong kenaikan pendapatan di sektor non basis dalam bentuk korelasi yang lebih ketat dibandingkan dengan menggunakan variabel lapangan kerja (Tarigan, 2005).

2.4 Sektor Unggulan

Suatu komoditi memiliki keunggulan bagi suatu wilayah apabila komoditi itu lebih unggul secara relatif dibanding komoditi lain. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk

perbandingan, lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibandingkan dengan komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh suatu wilayah (Tarigan, 2005).

Mc.Eacheen (2000) mengungkapkan keunggulan dari aspek lain yaitu keunggulan komparatif, dimana individu yang mempunyai *opportunity cost* lebih rendah untuk memproduksi suatu output tertentu harus berspesialisasi pada output tersebut. Hukum keunggulan komparatif menyatakan bahwa perusahaan, daerah, atau negara yang mempunyai *opportunity cost* atas produksi suatu barang harus berspesialisasi dalam produksi barang tersebut. Faktor-faktor seperti iklim, keterampilan tenaga kerja, kapital, dan sumber daya alam yang tersedia, masing-masing daerah tertentu di dunia mempunyai keunggulan komparatifnya masing-masing.

Dengan dasar tersebut sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*Comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*Competitive advantage*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar (Marhamah, 2000). Syarat suatu sektor tertentu untuk menjadi sektor unggulan adalah:

- a. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga pertumbuhan cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
- b. Adanya perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
- c. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
- d. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Sehubungan dengan itu, suatu daerah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonominya. Hal ini terkait dengan penentuan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2005).

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan Produk Domestik daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan Pendapatan Domestik (Anonim, 2021).

Pendapatan Regional didefinisikan sebagai nilai produk barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 2013). Sedangkan menurut Tarigan (2012), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan wilayah dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian. Lebih jauh, kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat digambarkan dengan melihat capaian PDRB yang dihasilkan baik atas dasar harga berlaku tahun berjalan, maupun atas dasar harga konstan (Anonim, 2021). Tinggi rendahnya nilai PDRB dipengaruhi oleh nilai-nilai yang disumbangkan oleh sektor-sektor ekonomi produktif yang ada dalam perekonomian.

2.6 Road Map Penelitian

Road map penelitian ini akan mengikuti klaster bidang sosial humaniora dengan payung riset unggulan IESP seperti berikut.

- Klaster Penelitian Bidang Sosial Humaniora : Pengentasan Kemiskinan.
- Riset Unggulan IESP berorientasi pada Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 1. Road Map Penelitian Ekonomi Pengembangan Wilayah 2018-2022.

| 2016/2017 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | Output/Outcome |
|--|---|--|---|--|
| Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lombok Barat secara agregat. | Analisis Integrasi Wilayah Pembangunan Secara Ekonomi Dan Spacial Di Lombok Barat NTB. Pengkajian diarahkan pada interdependensi antar wilayah. | Pengkajian Berbagai potensi ekonomi secara lebih mendalam terutama untuk potensi yang memiliki prospek dan terintegrasi di Lobar . | Kajian untuk pengembangan ekonomi dan potensi-potensi unggulan yang sudah teridentifikasi dengan lebih masif. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengetahui bahwa Daerah memiliki komoditi prioritas yang menjadi ikon ekonomi daerah ybs. ▪ Ada kejelasan informasi dan menjadi rujukan untuk para investor yang masuk kedaerah ybs. ▪ Rekomendasi kebijakan pembangunan. ▪ Usul untuk mendapat Hak paten (HAKI). |

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang guna membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, dianalisis, kemudian menyimpulkannya (Nazir, 2009). Hal-hal yang berkaitan dengan potensi dan prospek perkembangan sektor-sektor ekonomi yang berdampak teradap kesempatan kerja inilah yang akan dikaji di Kabupaten Lombok Barat periode 2015–2020.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat dengan pertimbangan bahwa belakangan daerah ini menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup dinamis yang didukung oleh potensi sumber daya alam dan manusia yang mengarah ke sektor sekunder dan tertier. Namun disisi lain pertumbuhan ekonominya cenderung tidak konsisten pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Oleh karena itu menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, bagaimana sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan sektor potensial tersebut dan kontribusinya pada serapan tenaga kerja daerah.

3.3 Jenis dan Sumber Data Serta Tehnik Pengumpulan

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang perolehan dan penyajiannya dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan institusi pengumpulnya. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka sumber ini akan berasal dari instansi-instansi terkait secara langsung dengan penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) baik untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat, serta instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian disamping juga data-data on-line.

Tehnik pengumpulannya menggunakan tehnik dokumentasi, yaitu cara atau tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang tersedia pada instansi terkait dengan penelitian untuk didokumentasikan, dicatat dan dianalisa. Data-data tersebut merupakan data yang sudah tersusun dan terdokumentasi dengan baik oleh lembaga terkait dalam bentuk laporan, booklet, file dan lainnya.

3.4 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional.

Variable utama yang terkait dengan penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) PDRB dan PDRB perkapita Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi yang ada disetiap daerah.
- 2) Laju pertumbuhan PDRB Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat. Laju pertumbuhan PDRB merupakan tingkat pertumbuhan PDRB setiap tahun masing-masing sektor disetiap daerah.
- 3) Sektor-sektor unggulan Kabupaten Lombok **Barat**. Sektor unggulan merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah

- 4) Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat. Pola pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dinamis setiap sektor/subsektor ekonomi dari waktu ke waktu dalam kurun waktu tertentu
- 5) Kesempatan kerja secara sektoral. Besaran tenaga kerja yang mampu diserap oleh setiap sektor ekonomi di Lombok Barat

3.5 Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka beberapa alat analisis akan digunakan antara lain:

1. Typology Klassen

Teknik ini dipakai untuk membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten tertentu dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan Provinsi. Karenanya typology Klassen menganalisis pola pertumbuhan ekonomi, yang dikelompokkan menjadi 4 tipe yaitu Tipe I daerah makmur, Tipe II daerah tertinggal dalam proses membangun, Tipe III daerah makmur yang sedang menurun (potensial untuk tertinggal), dan Tipe IV daerah tertinggal (Arsyad, 2010), seperti nampak pada tabel berikut;

Tabel 2. Typology Klassen Dengan 4 Type Daerah

| Tingkat pertumbuhan pendapatan Kabupaten dibandingkan tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi | Tingkat pendapatan Kabupaten dibandingkan tingkat pendapatan Provinsi | |
|---|---|---|
| | Tinggi (>1) | Rendah (<1) |
| Tinggi (>1) | Tipe I : Daerah makmur | Tipe II: Daerah tertinggal dalam proses membangun |
| Rendah (<1) | Tipe III: Daerah makmur sedang menurun (potensial untuk tertinggal) | Tipe IV: Daerah tertinggal |

2. Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengkaji sektor/subsektor dengan klasifikasi unggulan. Dalam hal ini akan mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan dalam suatu

daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peran kegiatan sejenis dalam perekonomian di atasnya (regional atau nasional), dengan formulasi (Azis, 1994) sebagai berikut:

$$LQ_i^R = \frac{V_i^R / V^R}{V_i / V}$$

di mana:

- V_i^R = pendapatan dari sektor i di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- V^R = pendapatan total di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- V_i = pendapatan dari sektor i di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- V = pendapatan total di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kriteria pengukurannya sebagai berikut:

- $LQ = 1$, berarti produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerah tersebut.
- $LQ > 1$, berarti sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis yang mampu mengekspor hasil/produknya ke daerah lain.
- $LQ < 1$, berarti sektor yang ada di daerah tersebut bukan merupakan sektor basis dan cenderung untuk mengimpor dari daerah lain.

3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Model ini digunakan untuk membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Ada dua rasio pertumbuhan dalam analisis ini (Imelia, 2006), yaitu:

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_s), wilayah studi disini merupakan Kabupaten Lombok Timur.
- Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RP_r), wilayah referensi dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian formula menghitung MRP adalah;

$$\text{Rasio Pertumbuhan Wilayah Prov.NTB (} RP_r \text{)} = \frac{\Delta E_{ir} / E_{ir(t)}}{\Delta E_r / E_{r(t)}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Wilayah Kab.Lotim(} RP_s \text{)} = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij(t)}}{\Delta E_{ir} / E_{ir(t)}}$$

Dimana :

- $\Delta E_{ir} = E_{ir(t+1)} - E_{ir(t)}$ adalah perubahan PDRB Provinsi NTB di sektor i.
- $E_{ir(t)}$ = PDRB Provinsi NTB di sektor i awal periode.
- $\Delta E_r = E_{r(t+1)} - E_{r(t)}$ perubahan PDRB Provinsi NTB.
- $E_{r(t)}$ = PDRB Provinsi NTB pada awal periode.
- $\Delta E_{ij} = E_{ij(t+1)} - E_{ij(t)}$ adalah perubahan PDRB Kabupaten Lombok Timur disektor i
- $E_{ij(t)}$ = PDRB Kabupaten Lombok Timur di sektor i awal periode.
- $\Delta E_j = E_{j(t+1)} - E_{j(t)}$ perubahan PDRB Kabupaten Lombok Timur.
- $E_{j(t)}$ = PDRB Kabupaten Lombok Timur pada awal periode.

Kriteria yang dipakai untuk tolok ukur kedua Ratio diatas (RP_s) dan (RP_r) adalah sebagai berikut:

- Bila nilai $RP_r > 1$ dan positif (+), menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan total wilayah referensi.
- Bila nilai $RP_r < 1$ dan negatif (-), menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih kecil dari pertumbuhan total wilayah referensi.
- Bila nilai $RP_s > 1$ dan positif (+), menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tertentu ditingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada wilayah referensi.
- Bila nilai $RP_s < 1$ dan negatif (-), artinya pertumbuhan sektor tertentu pada tingkat wilayah studi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut pada wilayah referensi.

4. Analisis Overlay

Model ini merupakan gabungan dari Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan Analisis Location Quotient (LQ), untuk menentukan sektor unggulan. Tujuannya adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi unggulan berdasarkan kedua model diatas. Dengan analisis Overlay ini akan diperoleh empat kemungkinan hasil (Arsyad, 2010), yaitu:

- Jika pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), maka sektor tersebut cukup dominan sehingga perlu mendapat prioritas dalam pembangunan.
- Jika pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), maka sektor tersebut sedang mengalami perkembangan sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kontribusinya.

- Jika pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), maka sektor tersebut sedang mengalami penurunan sehingga perlu memacu pertumbuhannya.
- Jika pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), maka sektor tersebut tidak potensial sehingga tidak layak untuk dikembangkan.

5. Analisis Peluang/Kesempatan Kerja

Menggunakan analisis Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP) untuk mengetahui kemampuan setiap sektor dalam perekonomian dalam menangkap peluang kesempatan kerja. Rumus yang digunakan untuk perhitungan ini adalah sebagai berikut (Arsyad, 2010):

$$\text{Rasio Penduduk-Pengerjaan} = \frac{\text{Jumlah penduduk suatu daerah}}{\text{Jumlah pekerja secara sektoral}}$$

BAB IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat berada pada pisisi 115,46° - 116,20° Bujur Timur, dan 8,25° - 8,55° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut (Regency & Figures, 2021);

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah.

Lombok Barat memiliki luas wilayah 1.053,92 km², dengan jumlah penduduk 721.480 jiwa, sehingga kepadatannya 685 jiwa/km². Secara administratif Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan (Sekotong, Lembar, Gerung, Kediri, Labuapi, Kuripan, Narmada, Lingsar, Gunungsari, dan Batulayar), dengan 122 desa/kelurahan serta 844 dusun. Sebagai gambaran, berikut ini adalah peta wilayah Kabupaten Lombok Barat berdasar wilayah kecamatannya.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Kecamatan



Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com>.

Dari aspek perekonomian, sektor pertanian masih dominan perannya terhadap perekonomian daerah. Meskipun peran tersebut makin menurun tiap tahun, namun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB di tahun 2020 masih cukup besar (22,57 persen). Sektor lainnya yang mendominasi perekonomian Lombok Barat berturut-turut adalah sektor perdagangan besar dan eceran 13,83 persen, konstruksi 11,51 persen, sektor transportasi dan pergudangan 9,23 persen serta pertambangan dan penggalian 6,80 persen (BPS Lombok Barat, 2021). Sedangkan sektor-sektor lainnya belum terlalu besar kontribusinya. Berdasarkan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa meski saat ini sektor pertanian masih dominan perannya, namun secara terstruktur pola perekonomian Lombok Barat mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, yang tentunya hal ini merupakan sesuatu yang baik bagi perekonomian karena akan mampu memberikan nilai tambah yang makin baik pula kedepan.

4.2 Sektor Unggulan dan Penciptaan Kesempatan Kerja.

Barometer untuk melihat tingkat perkembangan ekonomi dan sektor potensial suatu daerah tentu dengan mencermati pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB yang terus membaik dibarengi dengan keberadaan potensi-potensi ekonomi suatu daerah, muaranya tentu akan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu menjadi sangat urgen untuk mengidentifikasi berbagai sektor yang memiliki potensi dan keunggulan yang ada disuatu daerah yang diharap dapat sebagai penentu penggerak ekonominya. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, beberapa model analisis sebagai pendekatan untuk

mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang memiliki peluang sebagai penentu pertumbuhan ekonomi Lombok Barat di masa mendatang, menggunakan pendekatan analisis sebagaimana dijelaskan berikut ini.

A. Analisis Tipology Klassen

Pada dasarnya analisis Tipology Klassen menggambarkan tentang tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Lombok Barat dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan Provinsi NTB. Dengan kata lain menggambarkan pola pertumbuhan ekonomi antar kedua wilayah. Berdasarkan nilai variabel laju pertumbuhan PDRB dan nilai pendapatan perkapita Kabupaten Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Tipologi Klassen Kabupaten Lombok Barat 2017–2021.

| Tahun | Laju Pertumbuhan (%) | | Katagori | PDRB Perkapita (Juta) | | Katagori |
|-----------|----------------------|-------|------------|-----------------------|--------|------------|
| | Lombok Barat | NTB | | Lombok Barat | NTB | |
| 2017 | 6.54 | 0,09 | Tinggi (+) | 15.450 | 19.090 | Rendah (-) |
| 2018 | 0.57 | -4,50 | Tinggi (+) | 15.313 | 18.020 | Rendah (-) |
| 2019 | 3.84 | 3,90 | Rendah (-) | 15.425 | 18.513 | Rendah (-) |
| 2020 | -7.08 | -0,62 | Rendah (-) | 14.082 | 17.535 | Rendah (-) |
| 2021 | 3,40 | 2,30 | Tinggi (+) | 14.310 | 17.517 | Rendah (-) |
| Rata-rata | 0.77 | 0.23 | Tinggi (+) | 14.916 | 18.135 | Rendah (-) |

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil perhitungan seperti terlihat pada data dalam tabel diatas, ternyata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat cukup bervariasi/fluktuatif selama 5 tahun analisis. Diawali tahun 2017 dengan nilai positif cukup tinggi diangka 6,54%, kemudian turun tajam ditahun 2018 dibawah 1%. Hal ini terjadi karena efek gempa bumi yang sangat dahsyat melanda Lombok yang berdampak pula pada kegiatan ekonomi masyarakat. Namun di tahun 2019 keadaan sudah mulai membaik yang ditandai dengan pertumbuhan yang meningkat menjadi

3,84%. Hanya saja keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan, karena di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Lombok Barat terjun bebas mencapai -7,08%. Kondisi ini tidak mengherankan karena pada kurun waktu 2020-2021, wabah virus covid-19 sedang melanda dunia yang berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. Karena itu secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Lombok Barat selama 5 tahun analisis masih positif 0,77%, meskipun dalam suasana prihatin.

Kondisi yang tidak jauh beda terlihat di level NTB yang perubahannya juga tidak terjadi secara drastis, namun tetap fluktuatif (plus minus). Dimulai tahun 2017 dengan nilai 0,09%, turun menjadi -4,50% pada 2018. Namun di tahun 2019 naik lagi menjadi 3,90%, dan karena efek covid-19, maka tahun 2020 mengalami pertumbuhan negative lagi. Meskipun demikian secara rata-rata selama 5 tahun, nilai pertumbuhan ekonomi NTB masih positif diangka 0,23% dan nilai tersebut dibawah rata-rata nilai pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat.

Dari aspek pendapatan perkapita juga mencerminkan kondisi yang relatif sama polanya dengan pertumbuhan ekonomi. Selama 5 tahun pengamatan pendapatan perkapita Kabupaten Lombok Barat rata-rata lebih rendah dengan pendapatan perkapita Propinsi NTB. Kisaran pendapatan perkapita Kabupaten Lombok Barat berada pada angka Rp14.916.000,- Sedangkan untuk Propinsi NTB kisarannya antara Rp17.517.000,- sampai dengan Rp18.513.000,- dengan rata-rata Rp18.135.000,-

Dengan demikian mengacu pada Tipology Klassen, maka Kabupaten Lombok Barat selama tahun pengamatan (2017-2021) jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya masuk dalam katagori tinggi (+) dibandingkan daerah NTB. Artinya selama waktu tersebut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat lebih

baik dari daerah NTB. Namun sebaliknya dari sisi pendapatan perkapita, Kabupaten Lombok Barat memiliki tingkat pendapatan perkapita relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perkapita Propinsi NTB. Dengan hasil tersebut, kalau merujuk pada analisis Tipology Klassen maka daerah Kabupaten Lombok Barat dari aspek pertumbuhan ekonominya tergolong dalam katagori tinggi (+), sedangkan dari sisi pendapatan perkapita termasuk dalam katagori rendah (-).

Oleh karena itu, dengan hasil perhitungan rata-rata dari laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Kabupaten Lombok Barat, dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat termasuk dalam tipe II, yaitu daerah **Tertinggal dan Dalam Proses Membangun**, sebagaimana dapat dilihat pada matrik berikut.

Tabel 4. Klasifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat Berdasar Tipology Klassen Selama 2017-2021.

| Tingkat pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi | Tingkat pendapatan Kabupaten/Kota dibandingkan dengan tingkat pendapatan Provinsi. | |
|---|--|---|
| | Tinggi (>1) | Rendah (<1) |
| Tinggi (>1) | Tipe I Daerah makmur. | Tipe II (Kabupaten Lombok Barat) Daerah tertinggal dan dalam proses membangun |
| Rendah (<1) | Tipe III Daerah makmur yang sedang menurun (potensial untuk tertinggal) | Tipe IV Daerah tertinggal |

Sumber : Data sekunder diolah

Dari matrik diatas terlihat bahwa Kabupaten Lombok Barat dalam rentang waktu 2017-2021 masih merupakan daerah dengan pola pertumbuhan ekonomi yang cenderung berkembang. Hal ini merujuk pada pola perekonomiannya selama 5 tahun pengamatan. Kalau dilihat secara partial, perkembangan tahunannya memang fluktuatif. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari masalah/musibah perekonomian regional maupun global yang melanda selama pengamatan.

Akibat selanjutnya berdampak pada pertumbuhan pendapatan perkapita yang juga mengalami pasang surut. Selama periode 2017-2019 terjadi kenaikan, namun di tahun 2020 turun lagi dan di periode berikutnya secara bertahap mengalami kenaikan. Hanya saja yang menjadi catatan disini adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat secara rata-rata lebih baik dan dinamis dibandingkan dengan Propinsi NTB.

Dengan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Propinsi NTB. Hal ini tentu disebabkan karena sektor-sektor pendukung pertumbuhannya seperti sektor jasa, industri pengolahan, real estate, pariwisata dan lainnya cukup stabil dan makin berkembang. Kondisi ini tidak lepas dari ciri-ciri ekonomi daerah penyangga ibukota propinsi (Mataram) pada umumnya, dimana pendukung utama pertumbuhannya adalah sektor tertier dan sekunder.

B. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk melihat posisi suatu sektor apakah termasuk dalam sektor basis (mampu memenuhi kebutuhan sendiri serta dapat berkontribusi pada daerah lain) atau non-basis dalam perekonomian. Mengacu pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat dan dibandingkan dengan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan diperoleh klasifikasi posisi tersebut. Hasil perhitungan LQ pada masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Lombok Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Sektor Basis Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021

| No | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rata ² | Tanda |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.9299 | 0.8905 | 0.8882 | 0.9622 | 0.9507 | 0.9243 | (-) NB |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0.3268 | 0.4679 | 0.4963 | 0.3969 | 0.3995 | 0.4175 | (-) NB |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.1285 | 1.0325 | 1.0419 | 1.1300 | 1.1177 | 1.0901 | (+) B |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.2499 | 1.1847 | 1.1733 | 1.2289 | 1.2047 | 1.2083 | (+) B |
| 5 | Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah | 1.4213 | 1.3920 | 1.4081 | 1.5259 | 1.5056 | 1.4506 | (+) B |
| 6 | Konstruksi | 1.4528 | 1.3248 | 1.2822 | 1.2716 | 1.2280 | 1.3119 | (+) B |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 1.0141 | 0.9195 | 0.9277 | 0.9757 | 0.9620 | 0.9598 | (-) NB |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1.4677 | 1.4345 | 1.4307 | 1.8660 | 2.0091 | 1.6416 | (+) B |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 3.8513 | 3.4684 | 3.3870 | 3.2204 | 3.1881 | 3.4230 | (+) B |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1.1259 | 1.0681 | 1.0684 | 1.1247 | 1.1127 | 1.1000 | (+) B |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.9478 | 0.8857 | 0.8877 | 1.0001 | 1.0066 | 0.9456 | (-) NB |
| 12 | Real Estate | 1.2451 | 1.0318 | 1.0320 | 1.0969 | 1.0863 | 1.0984 | (+) B |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0.6910 | 0.5514 | 0.5448 | 0.5372 | 0.5316 | 0.5712 | (-) NB |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib | 1.1633 | 1.0688 | 1.0504 | 1.0774 | 1.0786 | 1.0877 | (+) B |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1.1985 | 1.0543 | 1.0375 | 1.1037 | 1.0896 | 1.0967 | (+) B |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.0974 | 0.9640 | 0.9641 | 1.0661 | 1.0555 | 1.0294 | (+) B |
| 17 | Jasa Lainnya | 1.2877 | 1.0356 | 1.0146 | 1.0574 | 1.0445 | 1.0880 | (+) B |

Sumber : Data primer diolah.

Keterangan : B = sektor basis

NB = sektor non-basis

Secara umum berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel diatas terlihat bahwa 12 sektor dari 17 sektor ekonomi (70,59%) Kabupaten Lombok Barat sudah masuk dalam katagori sektor basis. Hasil ini juga memiliki kesamaan dengan perhitungan RPs (tabel 7) yaitu sektor dengan pertumbuhan yang tinggi. Ke 12 sektor tersebut antaranya adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Pendidikan dll.

Sebaliknya terdapat 5 sektor yang tidak termasuk dalam sektor basis antaranya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Perusahaan.

Dengan gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor basis tersebut mampu men-support wilayah sendiri (Kabupaten Lombok Barat) untuk memenuhi kebutuhannya, disamping

memiliki kontribusi untuk mendukung daerah lainnya termasuk Propinsi NTB. Untuk itu tentu hal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerahnya. Dan kedepannya, sektor basis ini akan menjadi rujukan dan perhatian dalam menentukan sektor prioritas untuk dikembangkan, mengingat *multiplier effect* yang diciptakannya. Meskipun demikian sektor-sektor lainnya yang non basis, tetap harus mendapatkan perhatian untuk ditumbuh-kembangkan sehingga menjadi sektor basis pada masa berikutnya.

C. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP ini pada dasarnya adalah untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi berdasarkan kriteria pertumbuhan struktur ekonomi disebuah wilayah baik didalam maupun diluar wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu analisis ini acuannya adalah pada dua model rasio pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RP_r) yaitu wilayah di atasnya, dalam hal ini menggunakan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_s), yaitu daerah Kabupaten Lombok Barat. Dengan menggunakan acuan pada 2 wilayah komparatif diatas, maka dapat ditentukan klasifikasi pertumbuhan daerah Lombok Barat seperti berikut ini:

Klasifikasi I:

Jika sektor tersebut memiliki nilai RP_r dan RP_s positif (+) berarti kegiatannya pada tingkat provinsi maupun kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol, dan hal ini disebut **dominan pertumbuhan**.

Klasifikasi II:

Selanjutnya jika nilainya bervariasi, dimana RP_r positif (+) dan RP_s negatif (-) memberi makna bahwa kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol, tapi di tingkat kabupaten belum menonjol.

Klasifikasi III:

Sebaliknya kalau nilai RP_r negatif (-) sedangkan RP_s positif (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak menonjol sementara pada tingkat kabupaten termasuk menonjol.

Klasifikasi IV:

Terakhir, jika sektor dengan nilai RP_r dan RP_s negatif (-), menunjukkan kegiatan tersebut pada tingkat provinsi maupun kabupaten mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Berdasarkan klasifikasi diatas, hasil perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dari 17 sektor ekonomi Kabupaten Lombok Barat, hasilnya sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Model Ratio Pertumbuhan Lombok Barat Persektor Ekonomi

| No | Sektor Ekonomi | 2018/2019 | | 2019/2020 | | 2020/2021 | | Rata-Rata | | Tanda | |
|----|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------|----------------|-------|-----|
| | | RPr | RPs | RPr | RPs | RPr | RPs | RPr | RPs | RPr | RPs |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.3533 | 0.2747 | 0.6661 | -0.1309 | 0.4958 | 0.2960 | 0.5051 | 0.1466 | (+) | (+) |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0.0472 | 1.6181 | -44.4905 | 0.6406 | -0.0666 | 0.4624 | -14.8366 | 0.9070 | (-) | (+) |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.0448 | 1.2910 | 3.8726 | 0.1398 | 0.9112 | 0.6101 | 1.9429 | 0.6803 | (+) | (+) |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.8243 | 2.5743 | -14.2681 | -0.9480 | 3.3565 | 1.9833 | -2.6958 | 1.2032 | (-) | (+) |
| 5 | Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah | 0.9336 | 1.2446 | -6.7353 | -0.7988 | 0.2140 | 0.0631 | -1.8626 | 0.1697 | (-) | (+) |
| 6 | Konstruksi | 3.1324 | 2.2237 | 22.9443 | 2.9085 | 3.8814 | 1.8613 | 9.9861 | 2.3312 | (+) | (+) |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 1.6339 | 1.8873 | 8.0069 | 0.9242 | 0.7489 | 0.4020 | 3.4632 | 1.0712 | (+) | (+) |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0.3431 | 0.2625 | 50.4440 | 2.3104 | 0.9303 | 3.2832 | 17.2392 | 1.9520 | (+) | (+) |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan | -0.0079 | -0.6339 | 45.4209 | 5.1425 | 0.5875 | 0.4154 | 15.3335 | 1.6413 | (+) | (+) |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1.0555 | 1.0632 | -19.9092 | -1.5164 | 2.1608 | 1.4620 | -5.5643 | 0.3362 | (-) | (+) |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.3588 | 0.4077 | -17.8825 | -2.4333 | 1.9045 | 1.8200 | -5.2064 | -0.0685 | (-) | (-) |
| 12 | Real Estate | 1.2208 | 1.2294 | -1.6707 | -0.0661 | 0.6403 | 0.4606 | 0.0635 | 0.5413 | (+) | (+) |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1.2848 | 0.9640 | 5.5381 | 1.5551 | 0.1451 | 0.1054 | 2.3226 | 0.8748 | (+) | (+) |
| 14 | Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan | 0.9315 | 0.4664 | -4.6944 | 0.1775 | 0.7563 | 0.8670 | -1.0022 | 0.5036 | (-) | (+) |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1.8055 | 1.3723 | -1.3123 | -0.0467 | 0.7239 | 0.4249 | 0.4057 | 0.5835 | (+) | (+) |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.5658 | 1.5759 | 3.8317 | -0.1396 | 3.4160 | 2.3354 | 2.9378 | 1.2573 | (+) | (+) |
| 17 | Jasa Lainnya | 1.4033 | 0.8512 | 9.9689 | 1.2144 | 0.7160 | 0.4344 | 4.0294 | 0.8333 | (+) | (+) |

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, seperti terlihat dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 sektor (35,29%) dari 17 sektor ekonomi yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa

pertumbuhan sektor-sektor tersebut sangat baik di Lombok Barat, meskipun wilayah referensi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki nilai yang lebih besar dari 1. Ini menggambarkan bahwa sektor tersebut tumbuh secara simultan dan saling mendukung di kedua daerah (daerah studi dan referensi). Sektor-sektor tersebut antara lain adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan sisanya masih terdapat 6 sektor yang bernilai positif meskipun kurang dari 1, namun nilainya lebih tinggi dari nilai wilayah referensi. Ini mencerminkan sektor-sektor ini memiliki peluang dan potensi untuk tumbuh lebih baik ke depan. Ke enam sektor tersebut adalah sektor Pertambangan dan Pengalihan, Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan.

Dengan hasil di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat, disamping sebagai penyangga ibu kota provinsi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan, terutama bidang pariwisata. Sehingga perkembangan basis ekonomi lebih mengarah pada bidang industri, jasa pendidikan, transportasi, dan telekomunikasi. Dan semakin maju suatu wilayah, maka kebutuhan-kebutuhan akan hal tersebut semakin besar diperlukan masyarakatnya.

Sebaliknya sektor-sektor seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa lainnya, dalam analisis ini menunjukkan perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan wilayah referensi. Ini tentunya terkait dengan kondisi secara umum, dimana sektor pertanian makin menurun kontribusinya dalam perekonomian global.

Demikian pula dengan sektor jasa-jasa, seperti diketahui Kabupaten Lombok Barat sebagai penyangga ibu kota propinsi, dan relative dekat jarak ibu kota keduanya, tentu kegiatan bidang jasa-jasa ini (para pelaku usaha) lebih memilih kota Mataram sebagai basis tempat kegiatannya, disamping akses yang mudah dalam berkegiatan juga jangkauan dalam pemasarannya yang lebih luas.

D. Analisis Peluang/Kesempatan Kerja

Menggunakan analisis Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP) untuk mengetahui kemampuan setiap sektor dalam perekonomian dalam menangkap peluang kesempatan kerja. Rumus yang digunakan untuk perhitungan ini adalah sebagai berikut (Arsyad, 2010):

$$\text{Rasio Penduduk-Pengerjaan} = \frac{\text{Jumlah penduduk suatu daerah}}{\text{Jumlah pekerja secara sektoral}}$$

Dengan mengacu pada 17 sektor ekonomi yang ada, terlihat bahwa setiap sektor memiliki peluang dan kemampuan serapan tenaga kerja yang berbeda. Dari analisis yang sudah dilakukan, peluang kesempatan kerja pada sektor ekonomi yang ada, didominasi (90,06%) oleh 5 sektor ekonomi utama di Lombok Barat. Kelima sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Keuangan dan Asuransi, Perusahaan, dan sosial. Sedangkan sector lain diluar yang lima sector tersebut, relative masih kecil kontribusinya dalam penciptaan kesempata kerja di Lombok Barat, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 7. Persentase Kesempatan Kerja Berdasar Lapangan Usaha di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2020.

| No | Kesempatan kerja sesuai Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | Rata ² |
|----|--|------|-------|-------|-------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 22.1 | 22.11 | 22.45 | 22.22 |
| 2 | Industri Pengolahan | 12.9 | 16.11 | 13.55 | 14.19 |
| 3 | Perdagangan Besar dan Eceran | 29.4 | 10.16 | 17.41 | 18.99 |
| 4 | Transportasi dan Pergudangan | 3.9 | 22.56 | 15.69 | 14.05 |
| 5 | Jasa Keuangan dan Asuransi, Perusahaan, dan sosial | 17.3 | 22.54 | 22.0 | 20.61 |
| 6 | Sektor lainnya | | | | 9,94 |

Sumber : Data primer diolah.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebenarnya bukan termasuk sektor basis di Lombok Barat, karena memang kontribusinya terhadap PDRB terus menurun tiap tahun. Demikian juga nilai ratio pertumbuhannya (MRP) relative kecil dibawah propinsi NTB sehingga termasuk tidak menonjol. Namun karena untuk bekerja di sector ini tidak memerlukan keterampilan dan persyaratan khusus, maka sangat mudah untuk menampung tenaga kerja berlebihan dimasyarakat.

Sedangkan sektor Jasa-jasa, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan serta Industri Pengolahan adalah 4 sektor ekonomi Lombok Barat yang belakangan ini terus tumbuh dengan baik. Hal ini terlihat dari 3 diantaranya sudah termasuk dalam sector basis. Dari ratio pertumbuhannya juga sudah positif yang mencerminkan bahwa sektor tersebut termasuk dalam katagori sector ekonomi yang menonjol di Lombok Barat. Kondisi yang baik ini tidak lepas dari pertumbuhan pariwisata daerah yang terus berkembang, yang mendorong sektor-sektor tertier seperti jasa terus tumbuh dengan pesat. Disamping juga posisi strategis Kabupaten Lombok Barat sebagai wilayah penyangga ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari aspek pola pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, Kabupaten Lombok Barat selama periode 2017–2021, berdasar kajian tipologi Klassen termasuk dalam klasifikasi Tipe II yaitu '*daerah tertinggal dan dalam proses membangun*'. Hasil ini tentu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat yang relatif lebih rendah dan dalam proses pengembangan jika dibandingkan dengan Propinsi NTB. Hal ini juga karena sektor-sektor pendukung pertumbuhannya masih didominasi oleh sektor sekunder dan mulai mengarah ke sektor tersier yang kedepan tentu akan mampu menciptakan nilai tambah lebih baik, seperti sektor jasa, penyediaan akomodasi makan minum, transportasi dan perdagangan, industri pengolahan, real estate, dan lainnya.
2. Selanjutnya dari analisis Location Quotient (LQ), dari 17 sektor ekonomi terdapat 12 sektor (70,59%) yang masuk katageri sektor basis (unggulan), dengan nilai LQ di atas 1, yaitu sektor penyediaan akomodasi makan minum, Industri Pengolahan, Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Pendidikan dll. Ke-12 sektor tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri (Kabupaten Lombok Barat) dan juga dapat di ekspor ke daerah lain diluar Kabupaten Lombok Barat.
3. Mengacu pada Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Kabupaten Lombok Barat memiliki 6 sektor ekonomi (35,29%) yang memiliki potensi yang menonjol karena ratio pertumbuhan (RPs) yang positif dan lebih besar dari 1. Sektor-sektor

tersebut diantaranya penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan lainnya. Dengan posisi tersebut ke-6 sektor tersebut termasuk dalam katagori sector dengan pertumbuhan yang dapat diandalkan kedepan.

4. Dari sisi peluang kesempatan kerja pada sektor ekonomi yang ada, 90,06 persen didominasi oleh 5 sektor ekonomi utama yaitu sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Keuangan dan Asuransi, Perusahaan, dan sosial. Sedangkan sector lain diluar yang lima sektor tersebut, relative masih kecil kontribusinya dalam penciptaan kesempatan kerja.

5.2 Saran

Dengan posisi Kabupaten Lombok Barat sebagai *daerah tertinggal dan dalam proses membangun*, maka menjadi tugas cukup berat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan statusnya menjadi daerah makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa rekomendasi penulis dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Daerah Lombok Barat antara lain:

1. Perlu pemetaan potensi-potensi ekonomi yang lebih strategis dan realistis yang dimiliki daerah yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat dan dunia usaha, yang memberi peluang kepada mereka (investasi) dalam pembangunan.
2. Pemerintah daerah juga perlu terus mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi, pelayanan administrasi yang makin baik dan transparan serta mudah untuk usaha-usaha produktif.

3. Pemerintah bersama asosiasi-asosiasi bisnis lebih aktif melakukan kegiatan promosi secara periodik terhadap hasil produksi/industri dan jasa-jasa melalui pameran-pameran dagang baik di tingkat lokal maupun nasional/internasional.
4. Aspek lain yang penting adalah terbangunnya suasana nyaman dan aman di daerah, yang menimbulkan ketenangan bagi pelaku usaha (investor) dalam berkiprah membangun dan mengembangkan bisnisnya. Masyarakat juga perlu dibangun kesadarannya untuk selalu bersikap positif dan ramah pada para pendatang, baik sebagai wisatawan maupun yang berkunjung untuk berbisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Badan Pusat Statistik, 2021, "Lombok Barat Dalam Angka 2015/2020", Katalog BPS. 1403.5202.
- _____, 2021, "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat", Mataram.
- _____, 2021, "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat", Gerung.
- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arsyad, L. 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke Lima. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____ 2011. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Cetakan Keempat. BPFE, Yogyakarta.
- Aziz, I. J., 1994, "Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia", FEUI, Jakarta.
- Imelia, E., 2006. "Modul Ekonomi Regional". Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi.
- Irawan, M. S., 2012, "Ekonomika Pembangunan", Edisi Keenam, BPFE. Yogyakarta.
- Marhamah. 2000. "Pertumbuhan Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Sumatra Utara Periode 1993-1997". Tesis.: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nazir, M., 2009, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudantoko. H. D, 2003, "Dilema Otonomi Daerah", ANDI, Yogyakarta:
- Sukirno, S. 2013. "Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sumato, 2014. Statistik Deskriptif, CAPS, Yogyakarta.
- Suryana, 2000. "Ekonomi pembangunan: Problematika dan Pendekatan". Salemba Empat. Jakarta,
- Tarigan, R. 2012. "Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi", Bumi Aksara. Jakarta,
- Todaro, M, P. 2010. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", Edisi kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- McEacheen, W. A. 2000. "Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer", Salemba Empat, Jakarta.

Sumber on-line:

<https://petatematikindo.wordpress.com>.

ooo0ooo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265

Fax.(0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

KONTRAK PENELITIAN

**SUMBER DANA DIPA BLU SKEMA PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS
UNIVERSITAS MATARAM**

Tahun Anggaran 2022

Nomor: 1902/UN18.L1/PP/2022

Pada hari ini **Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Muhamad Ali, Ph.D. : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 Dr. HAILUDDIN, MP. : **Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor: 4725/UN18/HK/2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul **"Potensi Sektor Unggulan dan Kontribusinya Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja di Kabupaten Lombok Barat"**.
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut
 - 1 Dr. HAILUDDIN, MP.
 - 2 Drs. Akung Daeng, M.Si.
 - 3 Drs. H. Mahyuddin Nasir, M. Si.
 - 4 Drs. Alamsyah AB, MP.
 - 5 Irwan Suriadi, SE., M.Si.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah **terhitung sejak Tanggal 9 Mei 2022 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2022.**

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian berupa:

| No. | Jenis Luaran Penelitian |
|-------------------------|---|
| Luaran Wajib : | |
| a | Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional) |
| b | |
| Luaran Tambahan: | |
| a | Rekomendasi Kebijakan |
| b | |
| c | |
| d | |

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - c PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 1 (Satu) eksemplar paling lambat 30 November 2022, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a Bukti fisik luaran penelitian;
 - b Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 1 (Satu) eksemplar (dijilid);
 - c Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sebanyak 1 (Satu) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - d Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) masing-masing sebanyak 1 (satu).
 - e Mengupload softfile poin a,c, dan d pada sistem simlitabmas.unram.ac.id

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9
SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 1 Desember 2022).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 19 Januari 2023, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

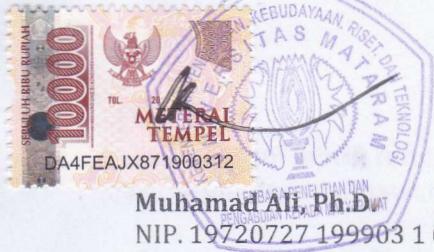
Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

Dr. HAILUDDIN, MP.
NIP. 19601231 198803 1 004

Anggota 1,

1 Drs. Akung Daeng, M.Si.

Anggota 2,

2 Drs. H. Mahyuddin Nasir, M. Si.

Anggota 3,

3 Drs. Alamsyah AB, MP.

Anggota 4,

4 Irwan Suriadi, SE., M.Si.